

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Babinkum TNI, *Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia 30 Tahun, cetakan Pertama*, 1976.

Atasan yang berhak Menghukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Jakarta; Babinkum TNI, 2006.

Atasan yang berhak Menghukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Jakarta; Mabesad, 2007.

Buku Petunjuk Administrasi tentang Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer. Jakarta ; Mabesad, 1994.

Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Kewenangan Ankom di Lingkungan TNI AD, Jakarta ; Mabesad, 2005.

Buaton, Tarsen, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Studi tentang kedudukan dan yuridiksinya, periode 1945-2000*, Jakarta ; Pasca Sarjana FH UJ, 2009.

Pemunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI AD, Jakarta ; Mabesad, 2007.

Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta ; Alumni AHM-P1HM, 1982.

_____, S.R, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta; 2010

- Tim Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta ; Impersial, 2007.
- Manan, Bagir., *Sistem Peradilan Berwibawa*; Mahkamah Agung RI. Jakarta; 2004.
- _____, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung LPPM Universitas Islam Bandung; 1995.
- _____, *Kentara Mengenai Beberapa Masalah*,
- Mestokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak tahun 1942 dan apa manfaatnya bagi kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta; Liberty 1983.
- Muhaimin, Yahya A, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada, Universitas Press, 1982.
- Nasution, A. Haris, *Pokok-pokok Gerilya*, Jakarta; cetakan ke-2 tahun 1954.
- _____, *Tentara Nasional Indonesia III*; Seruling Masa, Jakarta; cetakan ke-1.
- _____, *Tentara Nasional Indonesia III*, ; Seruling Masa, Jakarta; 1971. cetakan ke-1
- _____, *Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia di Bidang Bersenjata*, Penerbit; Mega Bookstore, Jakarta; 1966.
- Poerwadarmata, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*,; Balai Pustaka Jakarta; 1984.
- Prakoso, Djoko., *Peradilan In Absensia di Indonesia*,; Ghalia Indonesia, 1985.
- Roscoe, Pound., *Filsafat Hukum* . Terjemahan Pasca Sarjana USU Medan.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Jakarta; 1999.

Salam, Faisal., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*; Mandar Maju, Bandung; 2002.

, *Peradilan Militer di Indonesia*; Maudar Maju, Bandung; 2004.

Subekti, R., *Sistem Peradilan Indonesia*, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No.4 tahun ke-13 Juli 1983.

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, cetakan kelima, Alfabeta Bandung; 2003

Suny Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1982.

Wabyono Padmo. *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sambutan Panglima TNI pada upacara serah terima Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI di Jakarta 1 September 2004.

C. PAPER MAKALAH / DIKTAT

Abdub, Muhammad., *Prosedur*, 1999.

, *Strategi Pengembangan etika dalam Pemerintahan dalam Forum Diskusi LAN.USU*, Medan; 2002.

Diktat, *Pendidikan Diklatu Minpers*. Lembang, Bandung; 1987.

Manan, Bagie., *Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman, makalah pada seminar fungsi dan Peranan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketata Negara*. Bandung; Bapenas, Unpad. 1998.

D. WEBSITE

<http://kamubahasaindonesia.org/proses>

<http://woakdermavu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia>

<http://swadiri.blogspot.com/2010/06/norma-1-0-false-false-en-us-x-n.html>